

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi tolak ukur kemajuan bangsa Indonesia. Pertumbuhan pembangunan baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infra struktur merupakan target dari adanya APBD itu sendiri. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang anggaran belanja agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap di pertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (surplus).

Disamping itu, salah satu peran lembaga pemerintah dalam bidang pendidikan adalah bertanggung jawab dalam penataan negara yang baik, meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan pendidikan formal dan non formal, dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkualitas.

Di Indonesia khususnya di daerah Propinsi, Kabupaten/Kota ada suatu Dinas yang bertugas khusus dalam pendidikan, Dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jika Dinas ini lalai dalam menjalankan tugasnya, misalnya, tidak dapat menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas akan menyebabkan masyarakat tidak maju dan sejahtera. Oleh karena itu, dinas ini mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan yang baik, yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dalam melaksanakan tugasnya terbagi menjadi beberapa bidang/bagian. Semua bidang dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan ini bertanggung jawab dalam pendidikan di Kota Bukittinggi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin.

Sebagaimana organisasi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi terbagi menjadi bagian-bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Semua bagian akan bersatu dan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengkoordinasi semua bagian organisasi dengan berbagai program yang akan dilaksanakan, instansi ini akan menyusun strategi-strategi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya agar tercapai hasil yang maksimal.

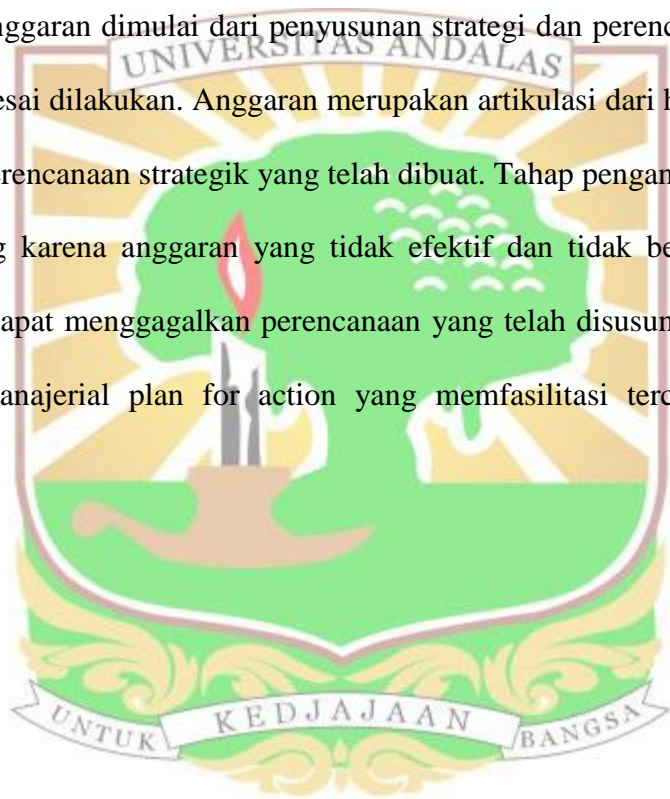
Salah satu strategi sebuah badan usaha atau instansi pemerintah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi adalah dengan menyusun anggaran. Anggaran menjadi hal yang penting karena digunakan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan-kegiatan demi keberlangsungan organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, anggaran dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya atau dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan yang tidak terbatas. Dana yang digunakan dalam setiap kegiatan dan program pada sektor publik merupakan dana milik rakyat. Dana tersebut berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan milik daerah atau Negara, dan pinjaman pemerintah baik dari obligasi maupun utang dari luar negeri. Itulah sebabnya anggaran pada sektor publik yang telah disusun akan dipublikasikan kepada

rakyat.

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana kerja jangka pendek, dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, dan harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi pada anggaran daerah.

Penganggaran dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Jadi anggaran merupakan manajerial plan for action yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.



Dalam penyusunan APBD, pemerintah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD yang memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah memuat sasaran dari anggaran itu sendiri.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang tidak memiliki pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri, seperti pajak dan retribusi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi hanya memiliki aliran kas masuk dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Oleh sebab itu, anggaran yang harus disusun adalah anggaran belanja, karena belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya tidak boleh melebihi dana yang disediakan pemerintah.

Untuk itu, agar dapat memaksimalkan kinerja yang berpatokan pada anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi perlu menyusun anggaran belanja sebaik mungkin. Penyusunan Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan rencana kerja dimaksudkan mengandung konsekuensi bahwa anggaran kerja, program, serta kegiatan yang dilaksanakan bersifat terukur dan sudah menghitung ketersediaan anggaran yang ada.

Apabila suatu Dinas tidak dapat menyusun anggaran dengan baik dan tidak memperhatikan kebijakan yang ditentukan dalam prosedur penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka pembelanjaan dinas itu tidak akan terealisasi dengan baik. Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dituntut untuk dapat menyusun dan mengikuti prosedur dan

kebijakan yang berlaku dalam penyusunan anggaran, supaya kegiatan-kegiatan dan pembelanjaan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan sempurna sehingga nantinya dapat mempertanggungjawabkan segalanya kepada pemerintah dan masyarakat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dapat dilakukan penilaian tentang sukses atau tidaknya kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya pada waktu yang bersangkutan. Hal ini bisa dijadikan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya penyusunan anggaran pada suatu satuan kerja pemerintah dan analisis realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada masyarakat, maka penulis melakukan praktek kerja lapangan/magang dan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, yang berjudul: “EVALUASI PENYUSUNAN DAN CAPAIAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
2. Bagaimana capaian anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2017

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui capaian anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2017.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan mempertimbangkan penelitian tersebut, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis semoga dengan kerja praktik ini dapat menambah pengalaman yang baru dengan cara praktik langsung pada perusahaan, menambah wawasan penulis tentang topik mengenai proses dan prosedur penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan menambah keterampilan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh sebagai bahan untuk membuat tugas akhir.

2. Bagi Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Bagi Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebagai objek yang diteliti, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari saran yang penulis kemukakan untuk penyempurnaan analisis pada proses penyusunan dan capaian anggaran belanja yang diharapkan.

3. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap hasil ini dapat digunakan bagi teman-teman mahasiswa/i lainnya untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, serta bermanfaat bagi junior dalam membuat paper atau penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan (Library Research) adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan anggaran sektor publik.
2. Lapangan (Field Research) adalah penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui dua cara, yakni:
 - a. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan Kepala dan Staf Sub- Bagian Program yang berhubungan dengan penyusunan

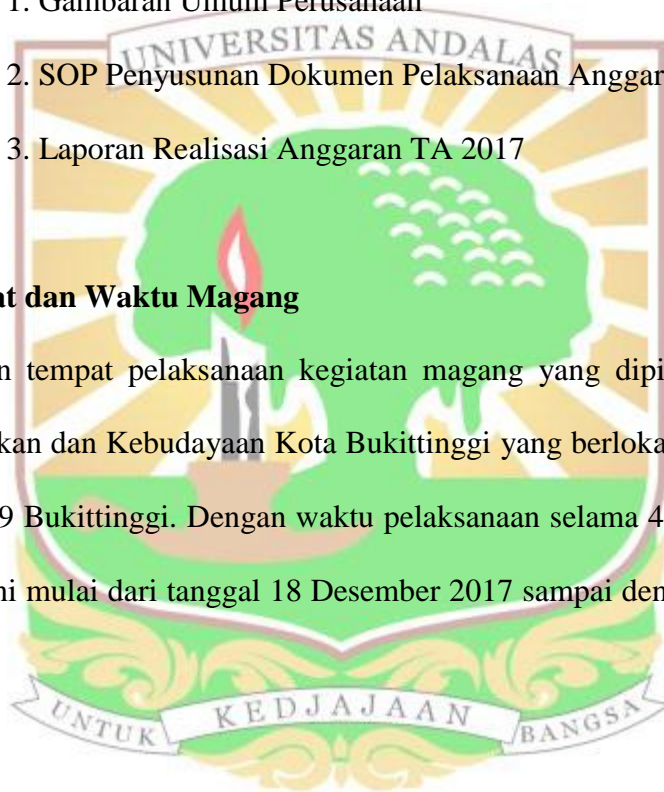
anggaran dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

- b. Observasi, yakni mengadakan pengamatan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan ini. Data-data yang dapat dikumpulkan meliputi:

1. Gambaran Umum Perusahaan
2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Laporan Realisasi Anggaran TA 2017

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan magang yang dipilih adalah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman no. 9 Bukittinggi. Dengan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kerja yakni mulai dari tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 15 Februari 2018.



1.7 Sistematika Pembuatan Laporan Magang

Sistematika penulisan Laporan Magang ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi, tempat dan waktu magang serta sistematika pembuatan laporan magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan dan menguraikan tentang anggaran (pengertian anggaran, penganggaran, tujuan, fungsi, dan keterbatasan), belanja (pengertian, konsep belanja pemerintah, kedudukan belanja dalam APBD), anggaran belanja (pengertian, prinsip-prinsip penyusunan, proses penyusunan, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan), serta realisasi anggaran (tujuan laporan realiasi anggaran, manfaat penyusunan realisasi anggaran).

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi (sejarah singkat; latar belakang; visi dan misi; urusan, tugas pokok, dan fungsi; struktur organisasi dan uraian tugas; serta program dan ruang lingkup kegiatan).

BAB IV : PEMBAHASAN

pembahasan masalah yang merupakan hasil dari kegiatan magang yaitu menjelaskan tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran belanja, faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran belanja, anggaran belanja, analisis penyusunan anggaran belanja dan analisis capaian anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup dari laporan magang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis penyusunan dan capaian anggaran belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dan saran yang

dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

